

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Musadad. 2020. *Hukum Jaminan*. Cetakan Ke-1. Malang: Literasi Nusantara.
- Ahmad Setiawan. 2022. *Hukum Pertanahan Nasional*. Cetakan Ke 1. Yogyakarta: Laksbang Pustaka.
- A. Mukti Arto. 2018. *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*. Depok: Prenadamedia Group.
- Burhan Sidabariba. 2022 *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Hery Shietrs. 2016. *Praktik Hukum Jaminan Kebendaan*, Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan ke 4. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Laila M. Rasyid & Herinawati. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Munir Fuady. 2004. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nandang Alamsah D. 2021. *Administrasi Pertanahan*. Edisi 3. Cetakan ke 7. Banten: Universitas Terbuka.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purnama Tioria Sianturi. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Cetakan Ke 2. Bandung: Mandar Maju.

Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cetakan Ke 10. Bandung: Mandar Maju.

Sentosa Sembiring. 2007. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Perbankan*. Cetakan Ke 2. Bandung: Nuansa Aukia.

Sudiarto. 2011. *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*. cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana.

Urip Santoso. 2011. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana.

Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Ke 1. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Jurnal dan Tesis

Askari Razak. 2023. *Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*. Volume 12 Nomor 2. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum.

Budi Astuti dan M. Rusdi Daud. 2023. *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*. Al-Qisth Law Review. Vol.6 No. 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Cinda Yanti dan Gunawan Djajaputera. 2024. *Analisis Efektifitas Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*. Volume 5 Nomor 1. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik.

Edi Mulyanto. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Adanya Pemblokiran Sertifikat Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara*. 2021. Tesis. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Farida Patittingi. *Penegakan Hukum Di Bidang Pertanahan Suatu Tinjauan Teoretik*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2008. Jurnal Hukum Amanna Gappa. Volume 16 Nomor 4. Makassar: Umithoha Ukhuwah Grafika.

Roulina Lingga dan Gunawan Widjaya. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Sehingga Balik Nama Tidak Dapat Diproses*. Volume 1 Nomor 1. Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan.

Redy Savendra Sihaloho dan Agus Nurudin. 2019. *Pelaksanaan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum*. Volume 12 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Rosita. Tanpa tahun. *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*. Volume VI Nomor 2. Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law.

Zulfahmi Nur. 2023. *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*. Volume 6 Nomor 2. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat.

Internet

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-hak-tanggung-oleh-h-sarwohadi-s-h-m-h-28-1>

<https://pa-blora.go.id/index.php/e-dokumen/arsip-artikel/324-kewenangan-dan-problematika-eksekusi-hak-tanggung-syariah>

<https://pekaaksara.com/12909/hingga-april-2025-ratusan-juta-bidang-tanah-di-indonesia-terdaftar-dan-bersertifikat-elektronik/#:~:text=PADANG%2C%20pekaaksara.com%20%E2%80%94%20Pemerintah%20terus%20memperkuat%20kepastian,bersertifikat%20dan%20seluruhnya%20telah%20menggunakan%20format%20digital,>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14947/Parate-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggung.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-AcaraPerdata.html#:~:text=Upaya%20hukum%20merupakan%20upaya%20yang,rasa%20keadilan%2C%20karena%20hakim%20juga>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-makna-fungsi-sosial-dan-kepentingan-umum-yang-melekat-pada-tanah-lt614ec9f6a9e6e>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-2-macam-upaya-hukum-perdata-lt63f6adcfdd1bf/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-setempat-oleh-hakim-dalam-perkara-tanah>

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement* 1941)

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang